



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 82 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Persiapan serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak, Jo. Pasal 1 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Jo. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kearsipan, untuk mengatur sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan.

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip yang dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
7. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
8. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
9. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokannya.
10. Pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
11. Klasifikasi keamanan arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
12. Hak akses arsip adalah pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.

13. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak boleh diungkapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan negara dan pribadi.
14. Penggunaan arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
15. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
18. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. mendorong Perangkat Daerah agar memberkaskan arsip dinamis unit kerjanya secara tertib yang disertai dengan daftar arsip aktif ;
 - b. memberikan petunjuk kepada Perangkat Daerah agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;
 - c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas arsip dapat tetap terjaga; dan
 - d. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2). Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
 - c. tersedianya informasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan lampiran klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
 - d. terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sistem klasifikasi dan keamanan arsip dinamis; dan
- b. Pengaturan akses arsip.

BAB IV

SISTEM KLASIFIKASI DAN KEAMANAN ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu

Klasifikasi Keamanan

Pasal 4

- (1). Arsip dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah terbagi menjadi 4 (empat) kategori keamanan yang meliputi:
 - a. biasa/umum/terbuka;
 - b. terbatas;
 - c. rahasia; dan
 - d. sangat rahasia.
- (2). Biasa/umum/terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
- (3). Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
- (4). Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
- (5). Sangat Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.

Pasal 5

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam kategori arsip biasa/umum/ terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah antara lain:

- a. Arsip dinamis yang meliputi urusan pemerintahan daerah;
- b. Arsip dinamis yang meliputi urusan pertanian;

- c. Arsip dinamis yang meliputi urusan perdagangan;
- d. Arsip dinamis yang meliputi urusan perhubungan;
- e. Arsip dinamis yang meliputi urusan kelautan dan perikanan;
- f. Arsip dinamis yang meliputi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. Arsip dinamis yang meliputi urusan lingkungan hidup;
- h. Arsip dinamis yang meliputi urusan perindustrian;
- i. Arsip dinamis yang meliputi urusan penanggulangan bencana;
- j. Arsip dinamis yang meliputi urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. Arsip dinamis yang meliputi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. Arsip dinamis yang meliputi urusan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- m. Arsip dinamis yang meliputi urusan sosial;
- n. Arsip dinamis yang meliputi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- o. Arsip dinamis yang meliputi urusan kesehatan;
- p. Arsip dinamis yang meliputi urusan pendidikan dan kebudayaan;
- q. Arsip dinamis yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga;
- r. Arsip dinamis yang meliputi urusan energi dan sumber daya mineral;
- s. Arsip dinamis yang meliputi urusan kepegawaian;
- t. Arsip dinamis yang meliputi urusan keuangan; dan
- u. Arsip dinamis yang meliputi urusan non keuangan dan non kepegawaian, yaitu perencanaan, hukum, organisasi tata laksana, kearsipan, tata usaha kerumahtanggaan, humas, penelitian, pengkajian, pelatihan, perpustakaan, teknologi informatika dan telekomunikasi, persandian, dan pengawasan.

Pasal 6

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah, yang meliputi:

- a. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Kepegawaian seperti personal file, hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, rekam medis pegawai;
- b. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Perlengkapan seperti dokumen pengadaan barang;
- c. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Inspektorat seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal, Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen;
- d. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran di setiap unit kerja; dan
- e. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Arsip seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.

Pasal 7

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam kategori arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Perangkat Daerah yang meliputi:

- a. Arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan kasus/sengketa hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan personal file;
- b. Arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan sertifikat tanah, rancang bangunan dan instalasi listrik/telepon;
- c. Arsip yang tercipta yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Arsip yang terkait dengan kerugian ketahanan ekonomi nasional;
- e. Arsip yang terkait dengan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
- f. Arsip yang dengan isi akta otentik yang terakhir maupun wasiat seseorang kepada yang berhak secara hukum;
- g. Arsip yang terkait dengan rahasia atau data pribadi;
- h. Arsip yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama, dan daftar arsip rahasia.

Bagian Kedua Pengaturan Akses

Pasal 8

- (1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan kepada pengguna arsip yang berhak.
- (2) Pengguna arsip yang berhak mengakses arsip terdiri dari:
 - a. pengguna internal yang ada di instansi; dan
 - b. pengguna eksternal di luar instansi.

Pasal 9

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yaitu: penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pimpinan tingkat tertinggi yaitu Kepala Perangkat Daerah/instansi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 - b. pimpinan tingkat tinggi yaitu Kepala Bagian, Sekretaris, Kepala Bidang, atau yang disetarakan mempunyai kewenangan untuk mengakses Arsip dibawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin; dan
 - c. pimpinan tingkat menengah yaitu Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi atau yang disetarakan mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.

- d. pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas arsip, arsiparis dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk Arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan level tinggi, pimpinan level menengah, dan yang satu tingkat diatas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin; dan
 - e. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Publik, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan katagori biasa/terbuka;
 - b. pengawas eksternal, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan; dan
 - c. aparat penegak hukum, mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum.

BAB V

PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu Penyimpanan

Pasal 10

- (1). Penyimpanan dalam rangka penanganan fisik maupun informasi arsip dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi dapat dilakukan dengan memperhatikan media arsip.
- (2). Pengaturan pengguna arsip dinamis serta sarana dan prasarana penyimpanan arsip sesuai dengan media arsip sebagaimana lampiran peraturan ini.
- (3). Ketentuan tentang backup pada arsip elektronik yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi sangat rahasia meliputi juga ketentuan yang berlaku pada arsip dengan ketentuan rahasia dan terbatas.

Bagian Kedua Penyampaian

Pasal 11

- (1). Penyampaian dalam rangka penanganan fisik maupun informasi arsip dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi dapat dilakukan melalui pengiriman yang dilindungi sebagaimana lampiran peraturan ini.
- (2). Ketentuan yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi sangat rahasia meliputi juga ketentuan yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi rahasia dan terbatas.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 12

- (1). Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
- (2). Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa *filing cabinet*/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka dan terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia;
 - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3). Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

Pasal 13

- (1). Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan, dan media simpan arsip.
- (2). Pengamanan arsip kategori umum disimpan pada rak besi, arsip kategori terbatas di simpan pada *filing cabinet*, dan arsip kategori rahasia di simpan pada lemari besi.

Pasal 14

- (1). Pengamanan informasi arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi Penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.
- (2). Tujuan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di pusat arsip dan central file.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 15

- (1). Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip.
- (2). Arsiparis/ pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang dan tanggung jawab serta hak akses sesuai dengan unit kerja pengelolaan arsipnya.
- (3). Pejabat fungsional arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4). Pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Kearsipan Daerah.

Pasal 16

- (1). Penentuan Pengelola Arsip meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis di Bagian Arsip dan Pengelola Arsip Aktif di central file Perangkat Daerah.
- (2). Arsiparis sebagai pengelola arsip inaktif berperan dalam pengamanan arsip di pusat arsip dalam menetapkan hak akses arsip.
- (3). Arsiparis dan / atau Pengelola Arsip Aktif mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola arsip di pusat arsip.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 12 Oktober 2023

BUPATI CIANJUR

ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur

pada tanggal 13 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 358

Lampiran
Nomor
Tanggal
Hal

I
: 82 Tahun 2023

: Daftar Arsip Dinamis
Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

A. SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
1.	000	UMUM							
	000.1	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN							
	000.1.1	Telekomunikasi				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah
	000.1.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri							
	000.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Keuangan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah
	000.1.2.2	Perjalanan Dinas DPRD				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Keuangan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah
	000.1.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Keuangan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah
	000.1.3	Perjalanan Dinas Luar Negeri							
	000.1.3.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Keuangan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah
	000.1.3.2	Perjalanan Dinas DPRD				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Keuangan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah
	000.1.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Keuangan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah
	000.1.4	Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya)			√		Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi	Bagian Keuangan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah
	000.1.5	Rapat pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat			√		Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi	Bagian Keuangan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah
	000.1.6	Penyediaan Konsumsi				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Umum Sekretariat Daerah
	000.1.7	Pengurusan Kendaraan Dinas							
	000.1.7.1	Pengurusan surat-surat kendaraan dinas				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Umum Sekretariat Daerah
	000.1.7.2	Pemeliharaan dan perbaikan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Umum Sekretariat Daerah
	000.1.7.3	Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Umum Sekretariat Daerah
	000.1.8	Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		000.1.8.1				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Umum Sekretariat Daerah
		000.1.8.2				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Umum Sekretariat Daerah
		000.1.8.3				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Umum Sekretariat Daerah
		000.1.8.4				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Umum Sekretariat Daerah
		000.1.8.5				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Umum Sekretariat Daerah
		000.1.8.6				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Umum Sekretariat Daerah
		000.1.9						Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer	
		000.1.9.1				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Umum Sekretariat Daerah
		000.1.9.2				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Umum Sekretariat Daerah
		000.1.10						Ketertiban dan Keamanan	
		000.1.10.1				√	Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Umum Sekretariat Daerah/SATPOL PP
		000.1.10.2				√	Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Umum Sekretariat Daerah/SATPOL PP
		000.1.11				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Umum Sekretariat Daerah/SATPOL PP
		000.1.12				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Umum Sekretariat Daerah/SATPOL PP
	000.2	PERLENGKAPAN							
		000.2.1						Inventarisasi dan Penyimpanan	
		000.2.1.1				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah
		000.2.2.2				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	000.2.2	Pemeliharaan peralatan kantor							
	000.2.2.1	Data hasil pemeliharaan kantor				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah
	000.2.2.2	Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah
	000.2.3	Distribusi							
	000.2.3.1	Barang habis pakai				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah
	000.2.3.2	Barang milik daerah			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah
	000.2.4	Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah
	000.2.5	Pengelolaan Database Barang Milik Daerah			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah
	000.3	PENGADAAN							
	000.3.1	Rencana pengadaan Barang dan jasa (antara lain: : Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)			√		Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	000.3.2	Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	000.3.3	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	000.3.4	Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)			√		Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	000.3.5	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain : Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	000.3.6	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi			√		Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	000.4	PERPUSTAKAAN							
	000.4.1	Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.4.2	Deposit Bahan Pustaka							
	000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.4.3	Koleksi Pustaka							
	000.4.3.1	Pembelian				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		000.4.3.2 Hibah				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.4.3.3 Hadiah				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.4.3.4 Tukar Menukar				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.4.3.5 Implementasi Undang-Undang KCKR				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.4.3.6 Terbitan Internal				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.4.3.7 Pendistribusian bahan pustaka surplus				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.4.3.8 Inventarisasi koleksi (Buku Induk)				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.4.4	Pengolahan Bahan Pustaka				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.4.5	Pangkalan Data Katalog Koleksi				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.4.6	Layanan Perpustakaan							
		000.4.6.1 Keanggotaan				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.4.6.2 Peminjaman				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.4.6.3 Pengembangan gemar baca				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.4.7	Kerjasama Perpustakaan							
		000.4.7.1 MoU				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		000.4.7.2 Perjanjian kerjasama			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.4.7.3 Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.4.8	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan							
		000.4.8.1 Pengembangan situs web				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.4.8.2 Pengembangan kemas ulang informasi multimedia				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.4.8.3 Pengembangan program aplikasi perpustakaan				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.4.8.4 Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.4.9	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.4.10	Konservasi							
		000.4.10.1 Perawatan Bahan Perpustakaan				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.4.10.2 Perbaikan Bahan Perpustakaan				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.4.10.3 Penjilidan Bahan Perpustakaan				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.4.11	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.4.12	Transformasi Digital				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.4.13	Kurasi Digital				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.4.14	Pengembangan Perpustakaan					Semua		
		000.4.14.1 Perpustakaan Umum				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		000.4.14.2 Perpustakaan Khusus				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.4.14.3 Perpustakaan Sekolah				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.4.14.4 Perpustakaan Perguruan Tinggi				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.5 KEARSIPAN								
	000.5.1	Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.5.2	Pembinaan Kearsipan							
	000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis			√		Eselon III	Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.5.2.3	Penilaian Arsiparis			√		Eselon III	Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan			√		Eselon III	Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.5.2.5	Data Base Arsiparis				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi, antara lain : Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.5.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan, antara lain : Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, antara lain : Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip, antara lain : Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	000.5.3	Pengelolaan Arsip Dinamis							
	000.5.3.1	Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: daftar berkas dan daftar isi berkas)				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik)				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.5.3.4	Penggunaan (antara lain: daftar arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip)				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas arsip dinamis)				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.5.4	Program Arsip vital (antara lain: Identifikasi Arsip vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip vital, Penyelamatan Arsip vital dan Pemulihan Arsip vital)				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.5.5	Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.5.6	Penyusutan Arsip							Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.5.6.1	Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.5.6.2	Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip Yang Dimusnahkan.				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.5.6.3	Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsifan, Surat penyetoran autentik				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.5.7	Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.5.8	Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis							
	000.5.8.1	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif			√		Esselon IV	Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.5.8.2	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif			√		Esselon IV	Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.5.9	Pengelolaan Arsip Statis							
	000.5.9.1	Akuisisi (antara lain :)							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		a. Monitoring fisik dan daftar				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
		b. verifikasi terhadap daftar arsip				√	Eselon IV	Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
		c. Menetapkan status arsip statis				√	Eselon IV	Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
		d. Persetujuan untuk Penyerahan				√	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
		e. Penetapan arsip yang diserahkan				√	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
		f. Berita Acara Penyerahan				√	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
		g. Daftar Arsip yang diserahkan				√	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.5.9.2 Penghargaan dan Imbalan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.5.9.3 Sejarah Lisan (antara lain:)							
		a. Administrasi kegiatan,				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
		b. Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan,				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
		c. Laporan Kegiatan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
		d. Hasil Wawancara (Kaser/CD/media lain sesuai perkembangan TI				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
		e. dan Transkrip				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.5.9.4 Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		000.5.9.5 Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.5.9.6 Preservasi Preventif (antara lain:							
		a. penyimpanan,			√		Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
		b. pengendalian hama terpadu,				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
		c. reproduksi (alih media)				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.5.9.7 Preservasi Kuratif				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.5.9.8 Autentikasi Arsip Statis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis)				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.5.9.9 Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.5.10 Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.5.11 Pengelolaan SIKN dan JIKN				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.5.12 Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.5.13 Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.5.14 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.5.15	Pengawasan Kearsipan							
		000.5.15.1 Pengawasan Kearsipan Internal			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		000.5.15.2 Pengawasan Kearsipan Eksternal			√		Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
		000.5.15.3 Sanksi			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Bidang Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan
	000.6	PERSANDIAN							
	000.6.1	Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			√		Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Diskominfo
	000.6.2	Pengamanan persandian							
	000.6.2.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptopelaksanaan (Perencanaan dan Administrasi)			√		Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		Pelaporan			√		Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	000.6.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptopelaksanaan (Perencanaan dan Administrasi)			√		Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		Pelaporan			√		Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	000.6.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatanpelaksanaan (Perencanaan dan Administrasi)			√		Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		Pelaporan			√		Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	000.6.3	Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi							
	000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian			√		Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	000.6.3.2	Administrasi Pengkajian			√		Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	000.6.3.3	Pelaksanaan			√		Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		000.6.3.4 Pelaporan			√		Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	000.6.4	Pembinaan dan Pengendalian Persandian							
	000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)							
		Data Personal Sandi			√		Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		Pembinaan Personal Sandi			√		Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		Pengawasan dan Pengendalian			√		Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	000.6.4.2	Jaring Komunikasi							
		Data Matelilil dan JKS				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		Analisa Kebutuhan Materil dan Jaringan Komunikasi Sandi				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	000.6.5	Layanan Sertifikasi Elektronik							
	000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi			√		Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	000.6.5.2	Pelaksanaan verifikasi			√		Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing			√		Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik			√		Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	000.6.5.7	Pelaporan			√		Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	000.7	PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
	000.7.1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan / Musrenbang							
	000.7.1.1	Musrenbang Provinsi				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		000.7.1.2				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		000.7.1.3				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		000.7.1.4				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		000.7.1.5				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		000.7.1.6				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
	000.7.2	Perencanaan Pembangunan Daerah							
		000.7.2.1				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		000.7.2.2				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		000.7.2.3				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		000.7.2.4				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		000.7.2.5				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		000.7.2.6				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		000.7.2.7				√	Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		000.7.2.8				√	Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		000.7.2.9				√	Eselon II	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	000.7.2.10	Evaluasi Program				√	Eselon IV	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
	000.7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan				√	Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
	000.7.4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan				√	Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
	000.7.5	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan				√	Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
	000.7.6	Aksi Strategis Daerah							
	000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
	000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
	000.7.6.3	Sosialisasi dengan Perangkat Daerah				√	Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
	000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah				√	Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
	000.7.6.5	Penerapan perencanaan aksi strategi daerah				√	Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
	000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan							
	000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah				√	Eselon II	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
	000.7.7.2	Pendanaan Daerah				√	Eselon II	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
	000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional				√	Eselon II	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		000.7.7.4			√		Eselon II	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		000.7.7.5			√		Eselon II	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		000.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA							
		000.8.1							Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
		000.8.1.1				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		000.8.1.2				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		000.8.1.3				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		000.8.2							Uraian Jabatan
		000.8.2.1				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		000.8.2.2				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		000.8.3							Ketatalaksanaan
		000.8.3.1				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		000.8.3.2				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		000.8.3.3				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		000.8.3.4				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		000.8.4				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional
		000.8.5				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Evaluasi Kelembagaan
		000.8.6							Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah			
			SR	R	T	B						
		000.8.6.1	Budaya Kerja				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah		
		000.8.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah		
		000.8.6.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah		
		000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN										
		000.9.1	Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah					√	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	
		000.9.2	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi: rencana kerja, administrasi									
			1. Rencana Kerja									
			a. Master Plan/Rencana Strategis						√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
			b. Rencana Kerja Tahunan : Proposal/Ideu Concept Paper (ICP)						√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
			c. Berkas/Kontrak MOU Kerjasama/Material Transfer Agreement (MTA)						√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
			d. Perijinan Penelitian						√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
			2. Administrasi Penelitian									
			a. Surat Tugas/Surat Perintah						√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
			b. SK Pembentukan Tim Kerja						√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
			c. Dokumen/Formulir Pendukung/Instruksi						√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
			d. Persiapan Survey, Penggunaan Peralatan (alat dan bahan)						√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
			3. Pelaksanaan Penelitian/Pengkajian									
			a. Prosedur/Petunjuk						√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
			b. Data Primer						√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		c. Log Book				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		d. Studi Kelayakan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		e. Instrumen Penelitian				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		f. Pelaksanaan Surver			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		g. Laporan Hasil Pendataan/Survei			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		h. Analisis/Pengelolaan Data			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		4. Hasil Penelitian/Pengkajian/Rekomendasi							
		a. Laporan Hasil Penelitian dan hasil Luaran				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		b. Rekomendasi			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		5. Hasil Penelitian dan Pengkajian Hasil jasa Layanan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
	000.9.3	Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, hasil pengkajian dan pengembangan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
	000.9.4	Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
	000.9.5	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
	000.9.6	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan							
	000.9.6.1	Data							
		a. Data Kajian Penganggaran			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		b. Data Kajian Pembangunan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		000.9.6.2 Statistik				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		000.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		000.9.7 Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		000.9.8 Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		000.9.9 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		000.9.10 Seminar, lokakarya, temukarya, workshop				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
	100	PEMERINTAHAN							
	100.1	OTONOMI DAERAH							
		100.1.1 Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah/ Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		100.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Bagian Tata Pemerintah Sekretariat Daerah
		100.1.3 Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		100.1.4 Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)							
		100.1.4.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah/Bagian Tata Pemerintah
		100.1.4.2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah/Bagian Tata Pemerintah
		100.1.4.3 Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah/Bagian Tata Pemerintah

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	
			SR	R	T	B				
		100.1.4.4			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah/Bagian Tata Pemerintah	
		100.1.4.5			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah/Bagian Tata Pemerintah	
		100.1.5	Otonomi khusus dan daerah istimewa							
		100.1.6	Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)							
		100.1.6.1			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah/Bagian Tata Pemerintah	
		100.1.6.2			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah/Bagian Tata Pemerintah	
		100.1.6.3			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah/Bagian Tata Pemerintah	
		100.1.7				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah/Bagian Tata Pemerintah	
	100.2	PEMERINTAHAN UMUM								
		100.2.1	Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah					Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah / Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		100.2.2	Dekonsentrasi dan Kerjasama							
		100.2.1			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Tata Pemerintahan	
		100.2.2			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Tata Pemerintahan	
		100.2.3			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Tata Pemerintahan	
		100.2.4	Fasilitasi Kecamatan							
		a.	Fasilitasi (Database Pembentukan Kecamatan)				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Bagian Tata Pemerintahan
		b.	Koordinasi				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Bagian Tata Pemerintahan
		c.	Pembinaan dan Pengawasan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Bagian Tata Pemerintahan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		d. Monitoring dan Evaluasi				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Bagian Tata Pemerintahan
	100.2.5	Fasilitasi Pelayanan Umum							
		a. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Bagian Tata Pemerintahan
		b. Koordinasi Pelayanan Administrasi Kecamatan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Bagian Tata Pemerintahan
		c. Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Administrasi Kecamatan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Bagian Tata Pemerintahan
		d. Monitoring dan Evaluasi				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Bagian Tata Pemerintahan
	100.2.3	Wilayah Administrasi dan Perbatasan							
	100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah / Bagian Tata Pemerintah
	100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah / Bagian Tata Pemerintah
	100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah / Bagian Tata Pemerintah
	100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah / Bagian Tata Pemerintah
	100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah / Bagian Tata Pemerintah
	100.3	HUKUM							
	100.3.1	Program Legislasi							
	100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah
	100.3.1.2	Program Legislasi				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	
			SR	R	T	B				
		100.3.3.1				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
		100.3.3.2				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
		100.3.3.3				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
		100.3.3.4				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
		100.3.3.5				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
		100.3.3.6				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
		100.3.4	Instruksi / Surat Edaran							
		100.3.4.1				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
		100.3.4.2				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
		100.3.4.3				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
		100.3.4.4				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
		100.3.5	Surat Perintah							
		100.3.5.1				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
		100.3.5.2				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
		100.3.5.3				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	100.3.6	Standar/ Pedoman/ Prosedur Kerja/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	100.3.7	Nota Kesepakatan/ Memorandum of Understanding (MOU) / Kontrak / Perjanjian kerja							
	100.3.7.1	Dalam Negeri			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	100.3.7.2	Luar Negeri			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	100.3.8	Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	100.3.9	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pembinaan Hukum				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	100.3.10	Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu Kinerja	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	100.3.11	Kasus/ Sengketa Hukum							
	100.3.11.1	Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	100.3.11.3	Tata Usaha Negara			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	100.3.11.4	Perburuhan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	100.3.11.5	Arbitrase			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	100.3.11.6	Sengketa Adat			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	100.3.12	Perizinan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	100.3.13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	
			SR	R	T	B				
		100.3.13.1 Hak Cipta			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
		100.3.13.2 Hak Paten				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
		100.3.13.3 Hak Desain Industri				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
		100.3.13.4 Hak Rahasia Dagang				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
		100.3.13.5 Hak Merk				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
		100.3.14 Permohonan HAKI yang ditolak				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
200	POLITIK									
	200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
	200.1.1	Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah/ Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	
	200.1.2	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan								
	200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara			√		Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan					√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.2.3	Bela Negara				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan					√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan								
		a. Pembinaan Pembaruan Kebangsaan				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		b. Pembinaan Kewarganegaraan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		c. Fasilitasi Pembaruan dan Pelaksanaan Pembaruan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		d. Data Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK)				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.3	Kewaspadaan Nasional							
	200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan							
	200.1.4.1	Ketahanan Seni							
		a. Fasilitasi Pelaksanaan Pelestarian Kesenian				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		b. Pelaksanaan dan Perkembangan Nilai-nilai Kesenian				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.4.2	Ketahanan Budaya							
		a. Fasilitas Pelaksanaan Pelestarian Kebudayaan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		b. Pelaksanaan dan Perkembangan Nilai-nilai Kebudayaan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan							
		a. Fasilitasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		b. Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		c. Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		d. Pelestarian Nilai-nilai Keagamaan dan Kepercayaan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan							
		a. Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi masyarakat							
		1. Pendaftaran Ormas				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2. Database Ormas				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		b. Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan dengan ORMAS/LNL				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		c. Evaluasi Aktifitas Ormas Sanksi Administrasi				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		d. Fasilitasi Sengketa Ormas				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		e. Fasilitas Ormas				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan							
		a. Fasilitasi Pencegahan Penyelegunaan Narkotika				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		b. Masalah Soal Kemasyarakatan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.4.6	Fasilitasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.4.11	Fasilitasi Ormas				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	200.1.5	Politik Dalam Negeri							
	200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik							
	a.	Implementasi Kebijakan Politik (Sosialisasi dan Publikasi Best Practise dan Inovasi)				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	b.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.5.4	verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang memperoleh kursi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.5.6	Pemerintah Daerah				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.5.7	Database Parpol				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.5.9	Pemilihan Umum							
	a.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	b.	Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Wakil Rakyat				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	c.	Evaluasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	d.	Laporan Hasil Perkembangan Politik di Daerah				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	e.	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan dengan Ormas/LSM/LNL				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	200.1.6	Ketahanan Ekonomi							
	200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200.2	PEMILU							
	200.2.1	Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Komisi Pemilihan Umum
	200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih							
	200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Komisi Pemilihan Umum
	200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Komisi Pemilihan Umum
	200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Komisi Pemilihan Umum
	200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Komisi Pemilihan Umum
	200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Komisi Pemilihan Umum
	200.2.3	Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu							
	200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Komisi Pemilihan Umum
	200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Komisi Pemilihan Umum

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		200.2.3.3			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Komisi Pemilihan Umum
		200.2.3.4				√	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Komisi Pemilihan Umum
	200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu							
		200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota			√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Komisi Pemilihan Umum
		200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR			√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Komisi Pemilihan Umum
		200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR			√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Komisi Pemilihan Umum
		200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota			√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Komisi Pemilihan Umum
		270.04.05	Peta Daerah Pemilihan			√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Komisi Pemilihan Umum
	200.2.5	Pencalonan Pemilu							
		200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan			√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Komisi Pemilihan Umum
		200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran			√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Komisi Pemilihan Umum
		200.2.5.3	Daftar bakal calon			√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Komisi Pemilihan Umum
		200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon			√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Komisi Pemilihan Umum
		200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi			√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Komisi Pemilihan Umum
		200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap			√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Komisi Pemilihan Umum
	200.2.6	Kampanye Pemilu							
		200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye			√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Komisi Pemilihan Umum
		200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye			√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Komisi Pemilihan Umum
		200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye			√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Komisi Pemilihan Umum
	200.2.7	Pemungutan dan Penghitungan Suara							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	300.1.1	Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	300.1.2	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja							
	300.1.2.1	Tata Operasional Polisi Pamong Praja				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Penegakan Peraturan Daerah Pada SATPOL PP
	300.1.2.2	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Sumber Daya Aparatur SATPOL PP
	300.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Sumber Daya Aparatur SATPOL PP
	300.1.4	Perlindungan Masyarakat				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Sumber Daya Aparatur SATPOL PP
	300.1.5	Penyidik Pegawai Negeri Sipil			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Penegakan Peraturan Daerah Pada SATPOL PP
	300.1.6	Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Penegakan Peraturan Daerah Pada SATPOL PP
	300.2	PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN							
	300.2.1	Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			√		Esselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Kepala Pelaksana BPBD
	300.2.2	Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan							
	300.2.2.1	Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Kepala Pelaksana BPBD
	300.2.2.2	Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
	300.2.2.3	Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan			√		Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
	300.2.2.4	Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
	300.2.2.5	Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan			√		Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Cegah Siaga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	300.2.2.6	Registrasi BEACON			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Cegah Siaga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
	300.2.3	Pencegahan dan Kesiapsiagaan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Cegah Siaga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
	300.2.4	Potensi Pencarian dan Pertolongan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Cegah Siaga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
	300.2.5	Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan							
	300.2.5.1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Cegah Siaga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
	300.2.5.2	Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
	300.2.5.3	Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
	300.2.5.4	Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
	300.2.5.5	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
	300.2.6	Operasi Pencarian dan Pertolongan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
	300.2.7	Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	300.2.8	Operasi Komunikasi							
	300.2.8.1	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
	300.2.8.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
	300.2.8.3	Registrasi BEACON			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	300.2.9	Inventarisasi dan Pemeliharaan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
	300.2.10	Pengembangan Sistem Informasi							
		a. Perangkat Lunak				√	Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
		b. Perangkat Keras				√	Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
	300.2.11	Penyajian dan Layanan Informasi							
		a. Penyajian dan pelayanan Data Informasi				√	Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		b. Laporan dan Pembuatan Dokumentasi (Data Base)				√	Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	300.2.12	Pelaporan dan Evaluasi							
	300.2.12.1	Laporan Harian				√	Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
	300.2.12.2	Laporan Bulanan				√	Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
	300.2.12.3	Laporoan Tahunan				√	Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
	300.2.12.4	Evaluasi				√	Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT								
	400.1	PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL							
	400.1.1	Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
	400.1.2	Pembangunan Sumber Daya							
	400.1.2.1	Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
	400.1.2.2	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
	400.1.2.3	Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
	400.1.2.4	Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Kesra Sekretariat Daerah

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		400.1.2.5			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
		400.1.2.6				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
		400.1.2.7			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
	400.1.3	Peningkatan Infrastruktur							
		400.1.3.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
		400.1.3.2			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
		400.1.3.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
		400.1.3.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
		400.1.3.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
		400.1.3.6				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
		400.1.3.7			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
	400.1.4	Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha							
		400.1.4.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		400.1.4.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		400.1.4.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		400.1.4.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		400.1.4.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		400.1.4.6				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		400.1.4.7				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		400.1.4.8				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		400.1.4.9				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		400.1.4.10			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		400.1.4.11				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		400.1.4.12				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		400.1.4.13			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		400.1.4.14				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		400.1.5							
		400.1.5.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
		400.1.5.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
		400.1.5.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
		400.1.5.4			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Kesra Sekretariat Daerah

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		400.1.5.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
		400.1.5.6				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
		400.1.5.7			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
	400.1.6	Pengembangan Daerah Khusus							
		400.1.6.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
		400.1.6.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
		400.1.6.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
		400.1.6.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
		400.1.6.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
		400.1.6.6				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
		400.1.6.7			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
	400.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	400.2.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				√	Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Subbagian Perencanaan Program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.2.2	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum							
	400.2.2.1	Data gender				√	Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		400.2.2.2 Advokasi dan fasilitasi			√		Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.2.3	Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban							
		400.2.3.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan			√		Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.2.3.2 Data perlindungan perempuan			√		Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.2.3.3 Advokasi dan fasilitasi			√		Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.2.3.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan			√		Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.2.3.5 Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.2.3.6 Analisis dan penyajian informasi gender				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.2.3.7 Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.2.4	Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak							
		400.2.4.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak			√		Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.2.4.2 Data perlindungan anak			√		Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.2.4.3 Advokasi dan fasilitasi			√		Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	
			SR	R	T	B				
		400.2.4.4			√		Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		400.2.4.5			√		Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
	400.2.5	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan								
		400.2.5.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		400.2.5.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		400.2.5.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		400.2.5.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		400.2.5.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		400.2.5.6				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
	400.2.6	Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)					√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.2.7	Penghargaan Kabupaten Layak Anak					√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.2.8	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak					√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.3	PENDIDIKAN								
	400.3.1	Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah					√	Esselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Sub Bag Perencanaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.3.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal								

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		400.3.2.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		400.3.2.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		400.3.2.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		400.3.2.4			√		Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.3.3	Pendidikan Masyarakat							
		400.3.3.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		400.3.3.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		400.3.3.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		400.3.3.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		400.3.3.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		400.3.3.6				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		400.3.3.7				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.3.4	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.3.5	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama							
	400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.3.5.2	Block Grant				√	Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)				√	Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin				√	Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.3.6	Pendidikan khusus/Layanan Khusus							
	400.3.6.1	Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Guru Tenaga Kependidikan dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.3.6.2	Block Grant				√	Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Guru Tenaga Kependidikan dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.3.6.3	Lomba, festival				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Guru Tenaga Kependidikan dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		400.3.6.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Guru Tenaga Kependidikan dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		400.3.6.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Guru Tenaga Kependidikan dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		400.3.6.6				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Guru Tenaga Kependidikan dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik							
		400.3.7.1				√	Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Guru Tenaga Kependidikan dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		400.3.7.2				√	Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Guru Tenaga Kependidikan dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		400.3.7.3				√	Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Guru Tenaga Kependidikan dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		400.3.7.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Guru Tenaga Kependidikan dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		400.3.7.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Guru Tenaga Kependidikan dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		400.3.7.6				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Guru Tenaga Kependidikan dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		400.3.7.7				√	Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Guru Tenaga Kependidikan dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.3.11	Penilaian Pendidikan							
		400.3.11				√	Esselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan Daerah, Sumber Daya, Pemerintah Daerah, Ketertiban Umum, termasuk dampak ekonomi makro	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	400.3.12	Penilaian Non Akademik		√			Esselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan Daerah, Sumber Daya, Pemerintah Daerah, Ketertiban Umum, termasuk dampak ekonomi makro	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.3.13	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian			√		Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.3.12	Data dan Statistik Pendidikan							
	400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.3.13	Prasarana dan Sarana Pendidikan							
	400.3.13.1	Prasarana Pendidikan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.3.13.2	Sarana Pendidikan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi			√		Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.5	KEPEMUDAAN							
	400.5.1	Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.5.2	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda							
	400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.5.2.3	Pengembangan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.5.3	Peningkatan Wawasan Pemuda							
	400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan							
		a Program				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		b Evaluasi 400.5.3.2 Wawasan Lingkungan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		a Program				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		b Evaluasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		400.5.3.3 Wawasan Sosial dan Hukum							
		a Program				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		b Evaluasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.5.4	Peningkatan Kapasitas Pemuda							
		400.5.4.1 Kapasitas Iman dan Taqwa							
		a Program				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		b Evaluasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		400.5.4.2 Kapasitas IPTEK							
		a Program				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		b Evaluasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		400.5.4.3 Pemanfaatan IPTEK							
		a Program				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		b Evaluasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.5.5	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)							
		400.5.5.1 Pengkajian							
		a Program				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		b Evaluasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		400.5.5.2 Pengembangan							
		a Program				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		b Evaluasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.5.5.3	Pendayagunaan (fasilitasi)							
		a Program				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		b Evaluasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.5.6	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda							
		a Program				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		b Evaluasi				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan							
		a. Program				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		b. Evaluasi				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.5.7	Kewirausahaan							
	400.5.7.1	Kelembagaan							
		a Program				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		b Evaluasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.5.7.2	Pengaderan							
		a Program				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		b Evaluasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.5.7.3	Perintisan							
		a Program				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		b Evaluasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.5.8	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan							
	400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		a Program				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		b Evaluasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.5.8.2	Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya							
		a Program				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		b Evaluasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya							
		a Program				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		b Evaluasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya							
		a Pengkajian				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		b Pengembangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.5.9	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda							
	400.5.9.1	Standardisasi			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.5.10	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda							
	400.5.10.1	Kemitraan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.5.10.2	Penghargaan Pemuda				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	400.6	KEBUDAYAAN							
	400.6.1	Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Pada Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	
			SR	R	T	B				
		400.6.2.1			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		400.6.2.2				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		400.6.2.3					√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		400.6.2.4					√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	400.6.3	Pembinaan Kesenian dan Perfilman								
		400.6.3.1			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		400.6.3.2			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		400.6.3.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		400.6.3.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	400.6.4	Sejarah dan Nilai Budaya								
		400.6.4.1			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		400.6.4.2			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		400.6.4.3			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		400.6.4.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		400.6.4.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		400.6.4.6				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	400.6.5	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya								

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	400.6.5.1	Internalisasi nilai budaya			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	400.6.5.2	Kekayaan budaya				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	400.6.5.3	Warisan budaya nasional dan dunia				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	400.6.5.4	Diplomasi budaya				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	400.7	KESEHATAN							
	400.7.1	Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan DINAS KESEHATAN
	400.7.2	Upaya Kesehatan Dasar							
	400.7.2.1	Pelayanan kedokteran keluarga				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas kesehatan
	400.7.2.2	Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas kesehatan
	400.7.2.3	Pelaksanaan kesehatan primer				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas kesehatan
	400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas kesehatan
	400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas kesehatan
	400.7.2.6	ICD 10, Destistry & Stomatology				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas kesehatan
	400.7.2.7	Infeksi menular lewat transfusi darah				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas kesehatan
	400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas kesehatan
	400.7.2.9	Pembiayaan darah				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas kesehatan
	400.7.2.10	Penggunaan darah rasional				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas kesehatan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		400.7.2.11				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas kesehatan
		400.7.2.12				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas kesehatan
		400.7.2.13			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas kesehatan
		400.7.2.14			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas kesehatan
	400.7.3	Upaya Kesehatan Rujukan							
		400.7.3.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.3.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.3.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.3.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.3.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.3.6				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.3.7				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.3.8				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.3.9				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.3.10				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	400.7.4	Keperawatan dan keteknisian medik							
	400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.5	Penunjang medik dan sarana kesehatan							
	400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.5.2	Patologi dan toksilologi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.5.3	Radiologi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi				√	Semua	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Kesehatan
	400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.6	Kesehatan Jiwa							
	400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		400.7.6.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.6.5				√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.6.6				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra							
		400.7.7.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.7.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.7.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.7.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.8	Pengendalian penyakit menular langsung							
		400.7.8.1				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.8.2				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.8.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.8.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.8.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.9	Pengendalian penyakit bersumber binatang							
		400.7.9.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.9.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.9.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		400.7.9.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.10							
		400.7.10.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.10.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.10.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.10.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.10.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.11							
		400.7.11.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.11.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.11.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.11.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.11.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.12			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.13							
		400.7.13.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.13.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.13.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		400.7.13.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.13.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.14	Kesehatan ibu							
		400.7.14.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.14.2			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.14.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.14.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.14.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.15	Kesehatan anak							
		400.7.15.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.15.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.15.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.15.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.15.5			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.16	Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer							
		400.7.16.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.16.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.16.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.16.4			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Kesehatan
	400.7.17	Kesehatan kerja dan Olah raga							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.17.2	Kapasitas kerja				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.17.3	Lingkungan kerja				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Kesehatan
	400.7.17.5	Kesehatan perkotaan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.17.6	Kesehatan olahraga				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.18	Obat Publik dan perbekalan kesehatan							
	400.7.18.1	Harga obat publik			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Kesehatan
	400.7.18.2	Pengadaan obat				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.18.3	Perbekalan kesehatan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.19	Produksi dan distribusi alat kesehatan							
	400.7.19.1	Alat kesehatan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.20	Kefarmasian							
	400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian				√	Semua	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Kesehatan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		400.7.20.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.20.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.20.4				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Kesehatan
	400.7.21	Produksi dan distribusi kefarmasian							
		400.7.21.1				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Kesehatan
		400.7.21.2				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.21.3				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Kesehatan
		400.7.21.4				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Kesehatan
	400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan							
		400.7.22.1				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Kesehatan
		400.7.22.2				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Kesehatan
	400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan							
		400.7.23.1				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.23.2				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.23.3				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.23.4				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Kesehatan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		400.7.23.5 Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Kesehatan
	400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan							
		400.7.24.1 Tersedianya data NHA setiap tahun				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.24.2 Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.25	Intelegensia Kesehatan							
		400.7.25.1 Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.25.2 Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.26	Kesehatan Haji							
		400.7.26.1 Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.26.2 Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.27	Promosi Kesehatan							
		400.7.27.1 Sarana Promosi Kesehatan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.27.2 Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.27.3 Pengembangan pesan promosi kesehatan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
		400.7.27.4 Hari kesehatan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.28	Data dan Informasi							
		400.7.28.1 Statistik kesehatan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Sub bagian perencanaan program sekretariat Dinas Kesehatan
		400.7.28.2 Analisis dan diseminasi informasi		√			Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, merusak kemitraan dan reputasi	Dinas Kesehatan
		400.7.28.3 Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, merusak kemitraan dan reputasi	Dinas Kesehatan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen							
	400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Kesehatan
	400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Kesehatan
	400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.29.4	Obat Asli Indonesia				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.30	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya							
	400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Kesehatan
	400.7.30.2	Standardisasi produk pangan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.30.4	Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan				√	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kesehatan
	400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Kesehatan
	400.7.31	Rekam Medis			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Kesehatan
	400.8	AGAMA DAN KEPERCAYAAN							
	400.8.1	Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	400.8.2	Fasilitasi							
	400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		400.8.2.4 Kasus Keagamaan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		400.8.2.5 Kasus Aliran Keagamaan				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME							
		400.8.3.1 Kelembagaan dan kepercayaan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		400.8.3.2 Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		400.8.3.3 Komunitas Kepercayaan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		400.8.3.4 Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		400.8.3.5 Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	400.9	SOSIAL							
		400.9.1 Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Sub Bagia Perencanaan Program Pada Sekretariat Dinas Sosial
		400.9.2 Kesejahteraan Sosial Anak							
		400.9.2.1 Kesejahteraan sosial anak balita				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Sosial
		400.9.2.2 Kesejahteraan sosial anak terlantar				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
		400.9.2.3 Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Sosial
		400.9.2.4 Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
		400.9.2.5 Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Sosial
		400.9.3 Rehabilitasi Sosial							
		400.9.3.1 Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		400.9.3.2			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Sosial
		400.9.3.3			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Sosial
		400.9.4							
		400.9.4.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
		400.9.4.2		√			Eselon III	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan daerah, sumber daya pemerintah daerah, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Dinas Sosial
		400.9.4.3			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Sosial
		400.9.4.4			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Sosial
		400.9.5			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Sosial
		400.9.6							
		400.9.6.1			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Sosial
		400.9.6.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
		400.9.6.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
		400.9.7			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Sosial
		400.9.8			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Sosial
		400.9.9							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		400.9.9.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
		400.9.9.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
		400.9.9.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
		400.9.9.4			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Sosial
	400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam							
		400.9.10.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
		400.9.10.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
		400.9.10.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
		400.9.10.4			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Sosial
	400.9.11	Jaminan Sosial							
		400.9.11.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
		400.9.11.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
		400.9.11.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
		400.9.11.4			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Sosial
	400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial							
		400.9.12.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
		400.9.12.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
		400.9.12.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		400.9.12.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
		400.9.12.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
	400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil							
		400.9.13.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
		400.9.13.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
		400.9.13.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
		400.9.13.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
		400.9.13.5			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Sosial
	400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan							
		400.9.14.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
		400.9.14.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
		400.9.14.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
		400.9.14.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
		400.9.14.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
		400.9.14.6				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
	400.9.15	Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial							
		400.9.15.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
		400.9.15.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		400.9.15.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
		400.9.15.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Sosial
	400.10	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							
	400.10.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	400.10.2	Pemerintahan Desa dan Kelurahan							
	400.10.2.1	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	400.10.2.3	Fasilitasi Permusyawaratan Desa				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	400.10.2.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa		√			Eselon III	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan daerah, sumber daya pemerintah daerah, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	400.10.2.5	Pengembangan Kapasitas Desa				√	Semua	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	400.10.3	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat							
	400.10.3.1	Lembaga Masyarakat				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	400.10.3.2	Pembangunan Partisipatif				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Perdesaan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	400.10.4	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat							
	400.10.4.1	Budaya Nusantara				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		400.10.4.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		400.10.4.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		400.10.4.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		400.10.4.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		400.10.5							
		400.10.5.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		400.10.5.2				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		400.10.5.3				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		400.10.5.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		400.10.5.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		400.10.6							
		400.10.6.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		400.10.6.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		400.10.6.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		400.10.6.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		400.10.6.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		400.10.7				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	400.11	PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	400.11.1	Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Lingkungan Hidup
	400.11.2	Pertamanan							
	400.11.2.1	Perencanaan Pertamanan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Lingkungan Hidup
	400.11.2.2	Taman Kota				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
	400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
	400.11.3	Pemakaman							
	400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Lingkungan Hidup
	400.11.3.2	Pemakaman				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
	400.11.3.3	Pelayanan Pemakaman				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
	400.11.4	Jalur Hijau							
	400.11.4.1	Perencanaan Jalur Hijau			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Lingkungan Hidup
	400.11.4.2	Jalur Hijau Jalan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
	400.11.4.3	Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
	400.11.5	Peran Serta Masyarakat				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
	400.11.6	Pengawasan dan Penindakan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
	400.11.7	Pengelolaan Data				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
	400.11.8	Evaluasi dan Pelaporan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
	400.12	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	400.12.1	Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	400.12.2	Pendaftaran Penduduk							
	400.12.2.1	Identitas Penduduk				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	400.12.2.2	Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	400.12.2.3	Pindah Datang Penduduk Antar Negara				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	400.12.2.4	Pendataan Penduduk Rentan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	400.12.2.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	400.12.3	Pencatatan Sipil							
	400.12.3.1	Kelahiran dan Kematian				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	400.12.3.2	Perkawinan dan Perceraian				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	400.12.3.3	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	400.12.3.4	Pencatatan Kewarganegaraan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	400.12.3.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	400.12.4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
	400.12.4.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	400.12.4.2	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	400.12.4.3	Pengelolaan data Administrasi Kependudukan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		400.12.4.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		400.12.4.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		400.12.5							
		400.12.5.1				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		400.12.5.2				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		400.12.5.3				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		400.12.5.4				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		400.12.5.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		400.12.6							
		400.12.6.1				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		400.12.6.2				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		400.12.6.3				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		400.12.6.4				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		400.12.6.5				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		400.13							
		KELUARGA BERENCANA							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	400.13.1	Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Sub Bagian Perencanaan Program Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.2	Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk							
	400.13.2.1	Pengumpulan dan pengolahan data			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.2.2	Evaluasi dan pelaporan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.3	Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk							
	400.13.3.1	Penyiapan fasilitas			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.3.2	Evaluasi dan pelaporan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.4	Profil dan proyeksi penduduk							
	400.13.4.1	Data profil dan proyeksi penduduk			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.4.2	Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.5	Penetapan parameter pengendalian penduduk							
	400.13.5.1	Penetapan sasaran parameter			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	400.13.5.2	Evaluasi sasaran parameter			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.6	Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk							
	400.13.6.1	Pemanfaatan profil dan proyeksi			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.6.2	Pemanfaatan parameter			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.7	Pengembangan Sistem							
	400.13.7.1	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.7.2	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.8	Pengembangan Materi							
	400.13.8.1	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.8.2	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.9	Monitoring dan Evaluasi							
	400.13.9.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.9.2	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.10	Analisis Sosial			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.11	Analisis Ekonomi			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.12	Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	400.13.13	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.14	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.15	Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana							
	400.13.16.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.16.2	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.17	Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.18	Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.19	Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta							
	400.13.19.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.19.2	Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.20	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan							
	400.13.20.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.20.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.21	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan					Semua		
	400.13.21.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.21.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.22	Kesertaan keluarga berencana pria					Semua		

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		400.13.22.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.13.22.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.13.23				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.13.24				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.13.25				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.13.26							
		400.13.26.1				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.13.26.2				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.13.27							
		400.13.27.1				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.13.27.2				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.13.28							
		400.13.28.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.13.28.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.13.29							
		400.13.29.1				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		400.13.29.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.30	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan							
		400.13.30.1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.13.30.2 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.31	Pelebagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan							
		400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.13.31.2 Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.32	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan							
		400.13.32.1 Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.13.32.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	400.13.33	Pengembangan program usaha ekonomi keluarga				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.34	Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.35	Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga							
	400.13.35.1	Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.35.2	Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.36	Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.37	Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.38	Pelebagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		400.13.38.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.13.38.2 Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.13.39 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera							
		400.13.39.1 Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.13.39.2 Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.13.40 Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi							
		400.13.40.1 Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.13.40.2 Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.13.41 Advokasi dan pencitraan				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.13.42 Komunikasi, Informasi dan Edukasi							
		400.13.42.1 Promosi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.13.42.2 Sarana produksi media komunikasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		400.13.42.3 Produk media komunikasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	400.13.43	Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.44	Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota							
	400.13.44.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.44.2	Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.45	Hubungan dengan lembaga nonpemerintah							
	400.13.45.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.45.2	Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.46	Tenaga Lini Lapangan							
	400.13.46.1	Pengembangan tenaga lini lapangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.46.2	Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.47	Institusi Masyarakat Pedesaan							
	400.13.47.1	Pengembangan institusi masyarakat pedesaan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.47.2	Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.48	Mekanisme Operasional lini lapangan							
	400.13.48.1	Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	400.13.48.2	Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.49	Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan							
	400.13.49.1	Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.49.2	Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.50	Pengumpulan dan pengolahan data				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.51	Analisis dan evaluasi							
	400.13.51.1	Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.51.2	Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.52	Sistem aplikasi dan bank data							
	400.13.52.1	Pengembangan sistem aplikasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.52.2	Pengelolaan bank data				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.53	Infrastruktur teknologi informasi							
	400.13.53.1	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.53.2	Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.54	Dokumentasi dan penyebarluasan informasi							
	400.13.54.1	Dokumentasi dan perpustakaan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.13.54.2	Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT								
	400.14.1	Keprotokolan							
	400.14.1.1	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah
	400.14.1.2	Agenda kegiatan pimpinan daerah				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
	400.14.1.3	Agenda kegiatan pimpinan daerah				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
	400.14.1.4	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
	400.14.2	Daftar nama/alamat kantor /pejabat				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
	400.14.3	Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas, foto/ video/ rekaman suara/ multi media				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
	400.14.4	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan							
	400.14.4.1	Kliping koran				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
	400.14.4.2	Brosur /Leaflet/poster /plakat				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
	400.14.4.3	Pengumuman /pemberitaan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
	400.14.5	Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah							
	400.14.5.1	Hubungan antar lembaga pemerintah			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
	400.14.5.2	Hubungan dengan organisasi sosial / LSM			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
	400.14.5.3	Hubungan dengan perusahaan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
	400.14.5.4	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapang (PKL)				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
	400.14.5.5	Forum Kehumasan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	400.14.5.6	Hubungan dengan Media Massa							
		a. Siaran Pers/ Konevensi Pers/ <i>press release</i>				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
		b. Kunjungan Wartawan/Peliputan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
		c. Wawancara				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
	400.14.6	Dengar pendapat/hearing DPRD			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
	400.14.7	Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
	400.14.8	Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
	400.14.9	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
	400.14.10	Pameran /sayemara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
	400.14.11	Penghargaan/ tanda kenang-kenangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
	400.14.12	Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
500	PEREKONOMIAN								
	500.1	KETAHANAN PANGAN							
	500.1.1	Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.1.2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan							
	500.1.2.1	Ketersediaan Pangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.1.2.2	Akses Pangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		500.1.2.3 Kerawanan Pangan			√		Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.1.3	Distribusi dan Cadangan Pangan							
		500.1.3.1 Distribusi Pangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		500.1.3.2 Harga Pangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		500.1.3.3 Cadangan Pangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.1.4	Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan							
		500.1.4.1 Konsumsi Pangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		500.1.4.2 Penganekaragaman Pangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		500.1.4.3 Keamanan Pangan Segar			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.1.5	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan							
		500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		500.1.5.2 Penghargaan Ketahanan Pangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.1.6	Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.1.7	Bimbingan Teknis				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.1.8	Evaluasi			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.2	PERDAGANGAN							
		500.2.1 Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.2.2 Perdagangan Dalam Negeri							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		500.2.2.1			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.2.2.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.2.2.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.2.2.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.2.2.5			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.2.2.6				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.2.2.7				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.2.2.8			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.2.2.9				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.2.2.10				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.2.2.11				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.2.2.12			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.2.2.13				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.2.2.14				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.2.2.15				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.2.2.16				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.2.2.17				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	500.2.3	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen							
	500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.2.3.4	Tata usaha				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.2.3.11	Jasa			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.2.3.12	Kerjasama			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.2.3.14	Kelembagaan dan dan penilaian				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.2.3.16	Pengawasan			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		500.2.3.18 Balai Pengujian UTTP			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.2.4	Perdagangan Berjangka Komoditi							
		500.2.4.1 Pengkajian pasar				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.2.4.2 Pengawasan Transaksi			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.2.4.3 Pengawasan Keuangan dan Audit			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.2.4.4 Pengkajian pasar				√	Semua	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.2.4.5 Pengembangan Pasar			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.2.4.6 Sistem informasi				√	Semua	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.2.4.7 Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.2.4.8 Pengawasan pasar lelang			√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.2.4.9 Pengawasan sistem gudang			√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.2.5	Bimbingan Teknis				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.2.6	Evaluasi			√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.3	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH							
	500.3.1	Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah							
	500.3.2	Kelembagaan Koperasi dan UKM							
		500.3.2.1 Organisasi dan Badan Hukum Koperasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.3.2.2 Tata Laksana Koperasi dan UKM				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		500.3.2.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.3.2.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.3.3	Produksi							
		500.3.3.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.3.3.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.3.3.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.3.3.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.3.3.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.3.4	Pembiayaan							
		500.3.4.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.3.4.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.3.4.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.3.4.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.3.4.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.3.4.6				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.3.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha							
		500.3.5.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		500.3.5.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.3.5.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.3.5.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.3.5.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.3.5.6				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia							
		500.3.6.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.3.6.2				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.3.6.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.3.6.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.3.6.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha							
		500.3.7.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.3.7.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.3.7.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.3.7.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.3.7.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.3.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	500.3.8.1	Penelitian Koperasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.3.8.2	Penelitian UKM				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.3.9	Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.3.10	Pedagang Kaki Lima (PKL)							
	500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.3.10.2	Sarana dan Prasarana				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.5	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
	500.5.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.2	Perikanan Tangkap							
	500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		500.5.2.7				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.2.8				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.2.9							
		a. Pembinaan Nelayanan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		b. Pembinaan Pokmaswas				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.2.10				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.2.11				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.2.12				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.2.13				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.2.14				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.2.15				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.2.16				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.3							
		500.5.3.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.3.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.3.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.3.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.3.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		500.5.3.6				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.3.7				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.3.8				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.3.9				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.3.10				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.3.11				√	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.3.12				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.3.13				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.3.14				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.3.15				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.3.16				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan							
		500.5.4.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.4.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.4.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.4.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.4.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		500.5.4.6				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.4.7				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.4.8			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.4.9			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.4.10				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.4.11			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.4.12			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.4.13				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.4.14				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.4.15			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.4.16			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.4.17				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.4.18				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.4.19							
		a. Prmoasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		b. Kerja Sama				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		500.5.4.20 Pelayanan Usaha				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.4.21 Kemitraan Usaha				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.4.22 Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.4.23 Investasi dan Permodalan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.4.24 Informasi dan Promosi				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil							
		500.5.5.1 Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.5.2 Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.5.3 Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.5.4 Informasi dan Evaluasi Spasial				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.5.5 Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.5.6 Konservasi Wawasan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.5.7 Konservasi Jenis Ikan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.5.8 Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.5.17	Akses Permodalan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.5.20	Pengembangan Usaha				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		500.5.6.1 Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.6.2 Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.6.3 Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.6.4 Pengawasan Usaha Budidaya				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.6.5 Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.6.6 Pengawasan Pencemaran Perairan				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.6.7 Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.6.8 Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.6.9 Logistik dan Operasional Wilayah Barat				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.6.10 Logistik dan Operasional Wilayah Timur				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.6.11 Perawatan Kapal Pengawas				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.6.12 Pengawasan Kapal Pengawas				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.6.13 Sistem Pemantauan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.6.14 Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.6.15 Pemantauan Sumber Daya Perikanan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.6.16 Pengembangan Infrastruktur Pengawasan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	500.5.6.17	Penyidikan			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.7	Karantina Ikan							
	500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.7.2	Penahanan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.7.3	Pengasingan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.7.4	Pengamatan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.7.5	Pengkuan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.7.6	Penolakan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.7.7	Pemusnahan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.7.10	Permohonan Sertifikat				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.7.11	Pemasukan Formulir				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		500.5.7.13				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.7.14				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.7.15				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.7.16			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.7.17			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.7.18				√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.7.19				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.7.20				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
		500.5.7.21				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan
	500.6	PERTANIAN							
		500.6.1			√		Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		500.6.2							
		500.6.2.1							
		a. Teknologi Perlindungan Tanaman Buah				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		b. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		500.6.2.2							
		a. Teknologi Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		b. Pengendalian Organisme Tumbuhan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		500.6.2.3							
		Perlindungan Tanaman Florikultura							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		a. Teknologi Perlindungan Tanaman Florikultura				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		b. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Florikultura				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis							
		a. Pengolahan Dampak Iklim dan Lingkungan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		b. Informasi dan Persyaratan Teknis				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.3	Perbenihan Hortikultura							
	500.6.3.1	Penilaian varietas				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan							
	500.6.4.1	Basis Data Lahan				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.4.2	Pengendalian Lahan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi							
	500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.5.3	Iklm, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.5.4	Kelembagaan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.6	Pembiayaan Pertanian							
	500.6.6.1	Pembiayaan Program				√	Semua	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama				√	Semua	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis				√	Semua	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis				√	Semua	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.7	Pupuk Pestisida							
	500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.7.2	Pupuk Anorganik				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.7.3	Pestisida				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian							
	500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan							
	500.6.9.1	Penilaian varietas dan Pengawasan Mutu Benih				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.9.2	Produksi Benih Serealia				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.9.4	Kelembagaan Benih				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.10	Budidaya Serealia							
	500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.10.3	Jagung				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.10.4	Serealia Lain				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi							
	500.6.11.1	Kedelai				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.11.2	Ubi Kayu				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.11.3	Aneka Kacang				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.11.4	Aneka Umbi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	500.6.12	Tanaman Pangan							
	500.6.12.1	Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.12.3	Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan							
	500.6.13.1	Padi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.13.2	Jagung dan Serealia alin				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.13.4	Aneka Umbi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.14	Pengolahan Hasil Pertanian							
	500.6.14.1	Tanaman Pangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.14.2	Hortikultura				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.14.3	Perkebunan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.14.4	Peternakan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.15	Mutu dan Standarasi							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	500.6.15.1	Standardisasi							
		a. Tanaman Pangan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		b. Hortikultura			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		c. Perkebunan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.16	Pengembangan Usaha dan Investasi							
	500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.16.2	Investasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.16.4	Promosi Luar Negeri				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.17	Pemasaran Domestik							
	500.6.17.1	Informasi Pasar				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	500.6.17.4	Jaringan Pemasaran				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.18	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, Antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan							
	500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.20	Diseminasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.21	Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian							
	500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.24	Data Penelitian dan Pengembangan				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.25	Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan							
	500.6.26.1	Hak Cipta				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.26.2	Hak Paten Sederhana				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.26.3	Hak Paten Biasa				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		500.6.26.4 Hak Merek			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		500.6.26.5 Pendaftaran varietas Tanaman				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		500.6.26.6 Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		500.6.26.7 Permohonan HKI yang ditolak			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.27	Pelayanan Perijinan Pertanian							
		500.6.27.1 Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		500.6.27.2 Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		500.6.27.3 Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.28	Pelayanan Hukum							
		500.6.28.1 Sertifikasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		500.6.28.2 Pertimbangan Hukum			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.29	Karantina Pertanian							
		500.6.29.1 Karantina Tumbuhan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		500.6.29.2 Karantina Hewan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.30	Bimbingan Teknis				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.6.31	Evaluasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.7	PETERNAKAN							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	500.7.1	Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Peternakan
	500.7.2	Peternakan dan Kesehatan Hewan							
	500.7.2.1	Pembibitan Ternak, Antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Peternakan
	500.7.2.2	Pakan Ternak				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Peternakan
	500.7.2.3	Budidaya Ternak				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Peternakan
	500.7.2.4	Kesehatan Hewan, Antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Peternakan
	500.7.3	Bimbingan Teknis				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Peternakan
	500.7.4	Evaluasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Peternakan
	500.8	PERKEBUNAN							
	500.8.1	Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.8.2	Tanaman Semusim							
	500.8.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.8.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.8.3	Tanaman Rempah & Penyegar							
	500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	500.8.3.3	Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.8.4	Tanaman Tahunan							
	500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.8.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.8.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.8.5	Perlindungan Perkebunan							
	500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.8.6	Pascapanen dan Pembinaan Usaha							
	500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.8.7	Bimbingan Teknis Perkebunan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.8.8	Evaluasi Perkebunan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	500.9	PERINDUSTRIAN							
	500.9.1	Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.2	Iklm Usaha dan Kerja Sama							
	500.9.2.1	Industri Manufaktur			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.2.2	Industri Agro				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.3	Promosi Industri							
	500.9.3.1	Industri Manufaktur				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.3.2	Promosi Industri Agro				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.4	Standarisasi dan Teknologi							
	500.9.4.1	Industri Manufaktur			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.4.2	Industri Agro			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.5	Hak dan Kekayaan Intelektual							
	500.9.5.1	Industri Manufaktur			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.5.2	Industri Agro			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.6	Industri Hijau							
	500.9.6.1	Industri Manufaktur				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.6.2	Industri Agro				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.12	Standarisasi							
	500.9.12.1	Standar				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Perindustrian Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.12.2	Penyiapan Penerapan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Perindustrian Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		500.9.12.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Perindustrian Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri							
		500.9.13.1				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Perindustrian Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.9.13.2				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Perindustrian Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.9.13.3				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Perindustrian Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup							
		500.9.14.1				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Perindustrian Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.9.14.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Perindustrian Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.9.14.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Perindustrian Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.9.15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual							
		500.9.15.1				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Perindustrian Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.9.15.2				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Perindustrian Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.9.15.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Perindustrian Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
		500.9.16				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Perindustrian Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
	500.11	PERHUBUNGAN							
		500.11.1				√	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Perhubungan
		500.11.2							
		500.11.2.1				√	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan Angkutan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		500.11.2.2			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan Angkutan
		500.11.2.3			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan Angkutan
		500.11.2.4			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan Angkutan
		500.11.2.5			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan Angkutan
		500.11.2.6			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan Angkutan
		500.11.2.7			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan Angkutan
		500.11.2.8			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan Angkutan
		500.11.2.9			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan Angkutan
		500.11.3	Pengembangan Transportasi Jalan						
		500.11.3.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan Angkutan
		500.11.3.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan Angkutan
		500.11.4	Pengujian Kendaraan Bermotor						
		500.11.4.1			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan
		500.11.4.2			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan
		500.11.4.3			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan
		500.11.4.4			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan
		500.11.5	Teknologi Kendaraan Bermotor						

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	
			SR	R	T	B				
		500.11.5.1			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan	
		500.11.5.2				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan	
		500.11.5.3				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan	
		500.11.5.4				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan	
		500.11.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas							
		500.11.6.1				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan	
		500.11.6.2				√		Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan	
		500.11.7	Perlengkapan Jalan							
		500.11.7.1				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan	
		500.11.7.2				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan	
		500.11.7.3				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan	
		500.11.7.4					√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan
		500.11.7.5					√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan
		500.11.8	Angkutan Penumpang							
		500.11.8.1					√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Angkutan Dinas Perhubungan
		500.11.8.2					√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Angkutan Dinas Perhubungan
		500.11.8.3					√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Angkutan Dinas Perhubungan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Angkutan Dinas Perhubungan
	500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Angkutan Dinas Perhubungan
	500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Angkutan Dinas Perhubungan
	500.11.8.7	Angkutan perintis				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Angkutan Dinas Perhubungan
	500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Angkutan Dinas Perhubungan
	500.11.9	Angkutan Barang							
	500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Angkutan Dinas Perhubungan
	500.11.9.2	Tarif angkutan barang				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Angkutan Dinas Perhubungan
	500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Angkutan Dinas Perhubungan
	500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Angkutan Dinas Perhubungan
	500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Angkutan Dinas Perhubungan
	500.11.10	Monitoring Operasional							
	500.11.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan
	500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan
	500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan
	500.11.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil							
	500.11.11.1	Pedoman Teknis				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		500.11.11.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan
		500.11.11.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan
		500.11.11.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan
		500.11.12							
		500.11.12.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
		500.11.12.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
		500.11.13							
		500.11.13.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
		500.11.13.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
		500.11.14				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
		500.11.15							
		500.11.15.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
		500.11.15.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
		500.11.16							
		500.11.16.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
		500.11.16.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
		500.11.16.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
		500.11.16.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	500.11.17	Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
	500.11.18	Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan							
	500.11.18.1	Manajemen lalu lintas				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
	500.11.18.2	Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
	500.11.18.3	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan angkutan sungai & danau				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
	500.11.18.4	Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
	500.11.19	Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan							
	500.11.19.1	Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
	500.11.19.2	Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
	500.11.19.3	Perambuan sungai, danau dan penyeberangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
	500.11.20	Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan							
	500.11.20.1	Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
	500.11.20.2	Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
	500.11.21	Tarif dan Keperintisan							
	500.11.21.1	Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
	500.11.21.2	Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
	500.11.22	Bina Sistem Transportasi Perkotaan							
	500.11.22.1	Jaringan Transportasi Perkotaan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
	500.11.22.2	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	500.11.22.3	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
	500.11.23	Lalu Lintas Perkotaan							
	500.11.23.1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan
	500.11.23.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan
	500.11.23.3	Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan
	500.11.24	Angkutan Perkotaan							
	500.11.24.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Angkutan Dinas Perhubungan
	500.11.24.2	Jaringan trayek perkotaan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Angkutan Dinas Perhubungan
	500.11.24.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Angkutan Dinas Perhubungan
	500.11.25	Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan							
	500.11.25.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan
	500.11.25.2	Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan
	500.11.25.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan
	500.11.26	Dampak Transportasi Perkotaan							
	500.11.26.1	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan
	500.11.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan
	500.11.26.3	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan
	500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		500.11.26.5			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan
		500.11.26.6			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan
		500.11.27	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan						
		500.11.27.1			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Perhubungan
		500.11.27.2			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Perhubungan
		500.11.27.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
		500.11.28	Pengembangan Keselamatan						
		500.11.28.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
		500.11.28.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
		500.11.29	Promosi dan Kemitraan Keselamatan						
		500.11.29.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
		500.11.29.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Perhubungan
		500.11.30	Bina Keselamatan Angkutan Umum						
		500.11.30.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknik Sarana & Keselamatan Dinas Perhubungan
		500.11.30.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknik Sarana & Keselamatan Dinas Perhubungan
		500.11.31	Audit Keselamatan						
		500.11.31.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknik Sarana & Keselamatan Dinas Perhubungan
		500.11.31.2			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Teknik Sarana & Keselamatan Dinas Perhubungan
		500.11.31.3			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Teknik Sarana & Keselamatan Dinas Perhubungan
		500.11.32	Inspeksi Keselamatan						

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	500.11.32.1	Pedoman keselamatan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknik Sarana & Keselamatan Dinas Perhubungan
	500.11.32.2	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Teknik Sarana & Keselamatan Dinas Perhubungan
	500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Teknik Sarana & Keselamatan Dinas Perhubungan
	500.11.33	Parkir							
	500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknik Sarana & Keselamatan Dinas Perhubungan
	500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknik Sarana & Keselamatan Dinas Perhubungan
	500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknik Sarana & Keselamatan Dinas Perhubungan
	500.12	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
	500.12.1	Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				√	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Persandian, dan Integrasi Data
	500.12.2	Telekomunikasi							
	500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistika
	500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistika
	500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistika
	500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistika
	500.12.3	Penyiaran							
	500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang pengelolaan informasi publik dan Statistika
	500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi				√	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan daerah, sumber daya pemerintah daerah, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Bidang pengelolaan informasi publik dan Statistika

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal							
	500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang pengelolaan informasi publik dan Statistiska
	500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang pengelolaan informasi publik dan Statistiska
	500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja	Bidang pengelolaan informasi publik dan Statistiska
	500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang pengelolaan informasi publik dan Statistiska
	500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang pengelolaan informasi publik dan Statistiska
	500.12.5	Pengendalian Informatika							
	500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja	Bidang pengelolaan informasi publik dan Statistiska
	500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja	Bidang pengelolaan informasi publik dan Statistiska
	500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja	Bidang pengelolaan informasi publik dan Statistiska
	500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja	Bidang pengelolaan informasi publik dan Statistiska
	500.12.6	e- Government							
	500.12.6.1	Tata Kelola e-Government			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Government			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	500.12.6.4	Aplikasi Layanan Kepemerintahan			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	500.12.7	e- Business							
	500.12.7.1	Tata Kelola e-Business			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkoneksi e-Business			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Business				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat							
	500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika							
	500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	500.12.9.4	Industri Konten Multimedia			√		Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	500.12.10	Keamanan Informasi							
	500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		500.12.10.4			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		500.12.10.5			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		500.12.11							
		500.12.11.1			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		500.12.11.2			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		500.12.11.3			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		500.12.12							
		500.12.12.1		√			Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan daerah, sumber daya pemerintah daerah, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		500.12.12.2		√			Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan daerah, sumber daya pemerintah daerah, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		500.12.12.3		√			Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan daerah, sumber daya pemerintah daerah, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		500.12.13							
		500.12.13.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		500.12.13.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		500.12.13.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		500.12.14							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		500.12.14.1			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		500.12.14.2			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		500.12.14.3			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	500.12.15	Infrastruktur Informatika							
		500.12.15.1		√			Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan daerah, sumber daya pemerintah daerah, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		500.12.15.2		√			Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan daerah, sumber daya pemerintah daerah, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		500.12.15.3		√			Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan daerah, sumber daya pemerintah daerah, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	500.12.16	Sistem dan Data							
		500.12.16.1		√			Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan daerah, sumber daya pemerintah daerah, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		500.12.16.2		√			Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan daerah, sumber daya pemerintah daerah, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		500.12.16.3		√			Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan daerah, sumber daya pemerintah daerah, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	500.12.17	Pusat Kerjasama							
		500.12.17.1			√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral			√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	500.12.18	Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat							
		500.12.18.1 Pelayanan Informasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		500.12.18.2 Hubungan Masyarakat				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		500.12.18.3 Bimbingan Teknis				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		500.12.19 Evaluasi			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	500.13	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							
	500.13.1	Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	500.13.2	Pengembangan Destinasi Wisata							
		500.13.2.1 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		500.13.2.2 Pengembangan Daya Tarik Wisata							
		a. Bimtek Daya Tarik Wisata				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		b. Fasilitasi Pengembangan Parawisata				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		c. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota Pusaka				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		d. Penilaian Kelayakan Tugas Pembantuan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		e. Penghargaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Cipta Awards)				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		500.13.2.3 Industri Pariwisata				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		500.13.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata							
		a. Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Parawisata				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		b. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		c. Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		500.13.2.5 Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	500.13.3	Pemasaran Pariwisata							
	500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata		√			Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap Privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	500.13.3.4	Pencitraan Indonesia			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	500.13.4	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya							
	500.13.4.1	Pengembangan industri Perfilman				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	500.13.4.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	500.13.5	Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK							
	500.13.5.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	500.13.5.2	Desain dan Arsitektur				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	500.13.5.3	Kerjasama dan Fasilitasi		√			Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap Privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	500.13.6	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif							
	500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	500.14	STATISTIK							
	500.14.1	Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Badan Pusat Statistik Cianjur
	500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Pusat Statistik Cianjur
	500.14.2.1	Perencanaan				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Pusat Statistik Cianjur
	500.14.2.2	Persiapan, Antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Pusat Statistik Cianjur
	500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik
	500.14.2.4	Pengolahan							
	a.	Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokan/Batching)				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Pusat Statistik Cianjur
	b.	Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding)				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Pusat Statistik Cianjur
	c.	Perekaman data (entri, scanner)				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Pusat Statistik Cianjur
	d.	Tabulasi Data				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Badan Pusat Statistik Cianjur
	e.	Pemeriksaan Tabulasi				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Badan Pusat Statistik Cianjur

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		f. Laporan konsistensi tabulasi				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Badan Pusat Statistik Cianjur
	500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus							
		a. Pembahasan angka hasil pengolahan				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Pusat Statistik Cianjur
		b. Penyusunan angka sementara				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Pusat Statistik Cianjur
		c. Penyusunan angka tetap				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Pusat Statistik Cianjur
		d. Penyusunan/pembahasan draft publikasi				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Pusat Statistik Cianjur
		e. Analisis Data				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Pusat Statistik Cianjur
		f. Penyusunan publikasi hasil sensus				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Pusat Statistik Cianjur
	500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus							
		a. Penyusunan bahan diseminasi: <i>Leaflet, booklet, website</i> , penyusunan CD dan Sejenisnya				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Badan Pusat Statistik Cianjur
		b. Sosialisasi hasil sensus melalui berbagai media				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Badan Pusat Statistik Cianjur
		c. Layanan dan promosi statistik				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Badan Pusat Statistik Cianjur
	500.14.3	Survei							
	500.14.3.1	Perencanaan				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Pusat Statistik Cianjur
	500.14.3.2	Persiapan				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Pusat Statistik Cianjur
	500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan							
		a. Pelaksanaan Listing				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Badan Pusat Statistik Cianjur
		b. Pemilihan Sampel				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Badan Pusat Statistik Cianjur
		c. Pengumpulan data				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Badan Pusat Statistik Cianjur

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		d. Pemeriksaan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Pusat Statistik Cianjur
		e. Pengawasan Lapangan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Pusat Statistik Cianjur
		f. Monitoring Kualitas			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Pusat Statistik Cianjur
	500.14.3.4	Pengolahan							
		a. Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokan/ Batching)			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Cianjur
		b. Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/ Coding)			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Cianjur
		c. Perekaman data (entri, scanner)			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Cianjur
		d. Tabulasi Data				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Cianjur
		e. Pemeriksaan Tabulasi				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Cianjur
		f. Monitoring Kualitas				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Cianjur
	500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei, Antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan							
		a. Pembahasan angka hasil pengolahan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Cianjur
		b. Penyusunan angka sementara			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Cianjur
		c. Penyusunan angka tetap			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Cianjur
		d. Penyusunan/pembahasan draft publikasi			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Cianjur

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		e. Analisis Data			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Cianjur
		f. Penyusunan publikasi hasil			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Cianjur
	500.14.3.6	Diseminasi hasil Survei							
		a. Penyusunan bahan diseminasi: <i>Leaflet, booklet, website</i> , penyusunan CD dan Sejenisnya				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Cianjur
		b. Penyusunan bahan diseminasi berupa Website				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Cianjur
		c. Penyusunan bahan diseminasi berupa CD dan sejenisnya				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Cianjur
		d. Sosialisasi Hasil Survei melalui berbagai media				√	Semua	Tidak ada dampak yang mengganggu Kinerja Instansi terkait	Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Cianjur
	500.14.4	Konsolidasi Data Statistik							
	500.14.4.1	Kompilasi Data			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Seksi Neraca Wilayah Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Cianjur
	500.14.4.2	Analisis data			√			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Seksi Neraca Wilayah Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Cianjur
	500.14.4.3	Penyusunan Publikasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Seksi Neraca Wilayah Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Cianjur
	500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Seksi Neraca Wilayah Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Cianjur
	500.15	KETENAGAKERJAAN							
	500.15.1	Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Transmigrasi
	500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja							
	500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.3	Pengembangan Standarisasi Kompetensi							
	500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja							
	500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan			√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan			√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan			√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan							
	500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.5.3	Tenaga Pelatihan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.6	Bina Pemagangan							
	500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		500.15.6.3 Perizinan dan Advokasi Pemagangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.15.6.4 Promosi dan Jenjang Pemagangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan							
		500.15.7.1 Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.15.7.2 Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.15.7.3 Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.15.7.4 Pengembangan Kewirausahaan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja							
		500.15.8.1 Informasi Pasar Kerja				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.15.8.2 Analisis Pasar Kerja				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.15.8.3 Bursa Kerja				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.15.8.4 Analisis Jabatan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.9	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri							
		500.15.9.1 Antar Kerja				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.15.9.2 Penempatan Tenaga Kerja Khusus				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.15.9.3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.15.9.4 Pemberdayaan Pengantar Kerja				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal							
		500.15.10.1 Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		500.15.10.2 Pengembangan Padat Karya				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.15.10.3 Terapan Teknologi Tepat Guna				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.15.10.4 Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.15.11 Standardisasi Profesi							
		500.15.11.1 Sistem Informasi dan Registrasi				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan dan tugas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.15.11.2 Pembakuan Akreditasi				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan dan tugas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.15.12 Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi							
		500.15.12.1 Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan dan tugas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.15.12.2 Perjanjian Kerja				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan dan tugas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.15.12.3 Kesejahteraan Pekerja				√	Semua	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan dan tugas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.15.12.4 Analisis Diskriminasi Syarat Kerja				√	Semua	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan dan tugas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.15.13 Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial							
		500.15.13.1 Organisasi Pekerja dan Pengusaha				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.15.13.2 Kelembagaan Hubungan Industrial				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.15.13.3 Pemasyarakatan Hubungan Industrial				√	Semua	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.15.14 Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial							
		500.15.14.1 Pengupahan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.15.14.2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.15.15 Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial			√		Eselon III	Memiliki dampk yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			√		Eselon III	Memiliki dampk yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			√		Eselon III	Memiliki dampk yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.16	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja							
	500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.17	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak							
	500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.17.3	Kerjasama Lintas Sektoral				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.18	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja							
	500.15.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.19	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagaakerjaan			√		Eselon III	Memiliki dampk yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	500.15.20	Bina Penegakan Hukum							
	500.15.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan			√		Eselon III	Memiliki dampk yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan			√		Eselon III	Memiliki dampk yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.20.4	Kerjasama Penegakan Hukum			√		Eselon III	Memiliki dampk yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.21	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)							
	500.15.21.1	Analisis dan Standardisasi bidang K 3			√		Eselon III	Memiliki dampk yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.21.2	Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3			√		Eselon III	Memiliki dampk yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.21.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.21.4	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.22	Pengembangan SDM dan Kompetensi K3							
	500.15.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.22.2	Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.22.3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3			√		Eselon III	Memiliki dampk yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.22.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3			√		Eselon III	Memiliki dampk yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.22.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3			√		Eselon III	Memiliki dampk yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.15.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3				√	Semua	Memiliki dampk yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.16	PENANAMAN MODAL							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	500.16.1	Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			√		Esselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	500.16.2	Perencanaan Penanaman Modal							
	500.16.2.1	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kineja	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	500.16.2.2	Perencanaan Industri Manufaktur			√		Esselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	500.16.2.3	Perencanaan Jasa dan Kawasan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kineja	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	500.16.2.4	Perencanaan Infrastruktur			√		Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	500.16.3	Pengembangan Iklim Penanaman Modal							
	500.16.3.1	Deregulasi Penanaman Modal			√		Esselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	500.16.3.2	Pengembangan Potensi Daerah			√		Esselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	500.16.3.3	Pemberdayaan Usaha				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kineja	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	500.16.3.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kineja	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	500.16.3.5	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kineja	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	500.16.3.6	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kineja	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	500.16.4	Promosi Penanaman Modal							
	500.16.4.1	Pengembangan Promosi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kineja	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	500.16.4.2	Analisis Strategi Promosi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kineja	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	500.16.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kineja	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	500.16.4.4	Promosi Sektoral				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kineja	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	500.16.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kineja	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	500.16.4.6	Pameran dan Sarana Promosi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kineja	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	500.16.5	Kerja Sama Penanaman Modal							
	500.16.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral			√		Esselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	
			SR	R	T	B				
		500.16.5.2			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		500.16.5.3				√	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	500.16.6	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal								
		500.16.6.1					√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		500.16.6.2					√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		500.16.6.3					√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		500.16.6.4				√	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		500.16.6.5				√	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		500.16.6.6				√	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	500.16.7	Pelayanan Penanaman Modal								
		500.16.7.1				√	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		500.16.7.2				√	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		500.16.7.3				√	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		500.16.7.4				√	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		500.16.7.5				√	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	500.17	PERTANAHAN								
		500.17.1				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	500.17.2	Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan								
		500.17.2.1					√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		500.17.2.2					√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		500.17.2.3 Data dan Informasi Pertanahan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		500.17.2.4 Advokasi dan Pengendalian				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	500.17.3	Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah							
		500.17.3.1 Penatagunaan Tanah			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		500.17.3.2 Data dan Pemetaan Tematik			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		500.17.3.3 Penguatan Atas Tanah			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	500.17.4	Sengketa Tanah							
		500.17.4.1 Pengkajian dan Penanganan Sengketa			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		500.17.4.2 Advokasi dan Pengendalian			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	500.18	TRANSMIGRASI							
		500.18.1 Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Transmigrasi
	500.18.2	Penyediaan Tanah Transmigrasi							
		500.18.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.18.2.2 Pengurusan Legalitas Tanah			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.18.2.3 Dokumentasi Pertanahan			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.18.2.4 Advokasi Pertanahan			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.18.3	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi							
		500.18.3.1 Penyiapan Lahan				√	Semua	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.18.3.2 Penyiapan Sarana				√	Semua	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.18.3.3 Penyiapan Prasarana				√	Semua	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		500.18.3.4				√	Semua	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.18.4	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi							
		500.18.4.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.18.4.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.18.4.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.18.4.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.18.5	Partisipasi Masyarakat							
		500.18.5.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.18.5.2			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.18.5.3			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.18.5.4			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.18.6	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi							
		500.18.6.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.18.6.2			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.18.6.3			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.18.6.4			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.18.6.5			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.18.7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat							
		500.18.7.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		500.18.7.2 Fasilitas Sosial Budaya				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.18.7.3 Pengembangan Kelembagaan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.18.7.4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.18.8	Pengembangan Usaha							
		500.18.8.1 Kewirausahaan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.18.8.2 Produksi				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.18.8.3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.18.8.4 Lembaga Ekonomi dan permodalan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.18.9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan							
		500.18.9.1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.18.9.2 Pengembangan Sarana				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.18.9.3 Pengembangan Prasarana				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.18.9.4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	500.18.10	Penyerasian Lingkungan							
		500.18.10.1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.18.10.2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.18.10.3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		500.18.10.4 Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN								
	600.1 PEKERJAAN UMUM								
	600.1.1	Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			√		Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.1.2	Penatagunaan Sumber Daya Air							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		600.1.2.1			√		Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.2.2							
		a. Komisi Irigasi			√		Eselon IV	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang SDA/Bintek dan Jakon Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		b. P3A			√		Eselon IV	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang SDA/Bintek dan Jakon Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		c. Masyarakat Peduli Sungai			√		Eselon IV	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang SDA/Bintek dan Jakon Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.2.3				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang SDA/Bintek dan Jakon Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.2.4							
		a. Data Curah Hujan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		b. Data Debit				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.2.5			√		Eselon IV	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.3							
		600.1.3.1			√		Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		a. Renstra SDA			√		Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.3.2			√		Eselon IV	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		a. RMP Konstruksi dan Non Konstruksi			√		Eselon IV	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.3.3							
		a. Data Base Irigasi			√		Eselon IV	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		b. Data Base Embung/Situ			√		Eselon IV	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		c. Data Base Sungai			√		Eselon IV	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		d. Data Base P3A dan Ormas SDA			√		Eselon IV	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.1.4	Pengelolaan Sumber Daya Air							
	600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		a. Perencanaan dan Konstruksi Sungai				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		a. Perencanaan dan Konstruksi Irigasi				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		a. Perencanaan dan Konstruksi Situ/Embung				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		a. Data Air Baku				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air							
	600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		a. Penanganan Kebencanaan di Sungai Kritis				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		a. OP Irigas				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		600.1.5.3 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		a. OP Embung				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.5.4 Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.5.5 Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.1.7	Pengembangan Jaringan Jalan							
		600.1.7.1 Keterpaduan Perencanaan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.7.2 Sistem Jaringan Jalan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.7.3 Lingkungan dan Keselamatan Jalan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.1.8	Pembangunan Jalan							
		600.1.8.1 Standar dan Pedoman				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.8.2 Manajemen Konstruksi			√		Eselon IV	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.8.3 Pengelolaan Geometrik, Perkerasan, dan Drainage			√		Eselon IV	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.8.4 Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng			√		Eselon IV	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.1.9	Preservasi Jalan							
		600.1.9.1 Standar dan Pedoman				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang Preservasi Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.9.2 Perencanaan Teknis			√		Eselon IV	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Preservasi Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.9.3 Teknik Rekonstruksi			√		Eselon IV	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Bidang Preservasi Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.9.4 Teknik Pemeliharaan Jalan							
		a. Penyediaan Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan Jalan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang Preservasi Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		b. Pengendalian teknis pemeliharaan jalan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang Preservasi Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		c. Penyusunan rencana teknis pemeliharaan jalan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang Preservasi Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		d. Pengembangan teknis perencanaan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang Preservasi Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		e. Penerapan teknologi bahan perkerasan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang Preservasi Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		f. Penyelesaian pekerjaan teknis pemeliharaan jalan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Bidang Preservasi Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.1.10	Pengelolaan Jembatan							
	600.1.10.1	Standar dan Pedoman				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.1.10.2	Perencanaan Teknis			√		Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.1.10.3	Teknik Jembatan			√		Eselon IV	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.1.11	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah							
	600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.1.12	Pengaturan Jalan Tol							
	600.1.12.1	Persiapan pengusaha jalan tol			√		Eselon IV	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol			√		Eselon IV	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol			√		Eselon IV	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.1.12.4	Pengambilalihan hak pengusaha jalan tol			√		Eselon IV	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.1.13	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		600.1.13.1 Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.13.2 Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan				√	Eselon IV	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.1.14	Pengembangan Kawasan Permukiman							
		600.1.14.1 Perencanaan Teknis				√	Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.14.2 Kawasan Permukiman Perkotaan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.14.3 Kawasan Permukiman Pedesaan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.14.4 Kawasan Permukiman Khusus				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.14.5 Kelembagaan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.1.15	Pembinaan Penataan Bangunan							
		600.1.15.1 Perencanaan Teknis				√	Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.15.2 Penataan Bangunan Gedung				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.15.3 Pengelolaan Rumah Negara				√	Eselon IV	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.15.4 Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus				√	Eselon IV	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.15.5 Kelembagaan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.1.16	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum							
		600.1.16.1 Perencanaan Teknis				√	Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.16.2 Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		600.1.16.3				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.16.4				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.16.5				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.16.6				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.16.7				√	Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.17							
		600.1.17.1				√	Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.17.2				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		a. Pengelolaan Drainase Utama yang Masuk Ke Sungai				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.17.3				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.17.4				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.17.5				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.17.6				√	Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.1.18				√	Eselon IV	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN							
		600.2.1				√	Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	600.2.2	Perencanaan Pembiayaan Perumahan							
	600.2.2.1	Keterpaduan Perencanaan			√		Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.2.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.2.3	Kemitraan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.3	Pola Pembiayaan Perumahan							
	600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.4	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan							
	600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer			√		Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder			√		Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya			√		Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan			√		Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.4.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan							
		a. Sosialisasi dan Promosi				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		b. Kerjasama				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		c. verifikasi Tagihan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.5	Perencanaan Penyediaan Perumahan							
	600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		600.2.5.2				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		600.2.5.3				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		600.2.5.4							
		a. Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		b. Pembinaan Kelembagaan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.6	Penyediaan Rumah Susun							
		600.2.6.1				√	Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		600.2.6.2				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		600.2.6.3				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		600.2.6.4				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.7	Penyediaan Rumah Khusus							
		600.2.7.1				√	Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		600.2.7.2				√	Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		600.2.7.3				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		600.2.7.4				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		600.2.7.5				√	Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		600.2.7.6				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial							
	600.2.8.1	Perencanaan Teknik				√	Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.8.3	Fasilitas Hunian Berimbang				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.8.4	Fasilitas Penyediaan Lahan Perumahan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.9	Investasi Infrastruktur							
	600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur							
		a. Sinkronisasi dan Koordinasi				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		b. Bimbingan teknis dan supervisi				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		c. Pemantauan dan Evaluasi				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.9.3	Fasilitas dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur							
		a. Penyelesaian Permasalahan dan Pengembangan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		b. Koordinasi, Advokasi, dan Fasilitas di Bidang Penyelesaian Permasalahan dan Pengembangan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		c. Bimbingan teknis dan supervisi				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		d. Fasilitas Pembinaan Perusahaan BUMN Perum di Kementerian				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.9.4	Pasar Infrastruktur							
		a. Bimbingan teknis dan supervisi				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		b. Pemantauan dan Evaluasi Pasar Infrastruktur				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.10	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		600.2.10.1				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		600.2.10.2				√	Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		600.2.10.3				√	Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		600.2.10.4				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi							
		600.2.11.1				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		600.2.11.2				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		600.2.11.3				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		600.2.11.4				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi							
		600.2.12.1				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		600.2.12.2				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		600.2.12.3				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		600.2.12.4				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.13	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi							
		600.2.13.1				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		600.2.13.2				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.14	Peningkatan Jasa Konstruksi							
		600.2.14.1				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		600.2.14.2				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.15	Penerapan Teknologi Konstruksi							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi			√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		600.2.15.2	Pengembangan Materi			√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi			√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.16	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)							
		600.2.16.1	Antar Sektor			√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		600.2.16.2	Antar Wilayah			√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.17	Pengembangan Kawasan Strategis							
		600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis			√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis			√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.18	Pengembangan Kawasan Perkotaan							
		600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan						
		a.	Rencana dan Program			√	Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		b.	Pengembangan Area Inkubasi di Area Metropolitan			√	Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru							
		a.	Rencana dan Program			√	Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		b.	Pengembangan Area Inkubasi di Kota Besar dan Kota Baru			√	Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan							
		a.	Rencana dan Program			√	Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		b.	Pengembangan Area Inkubasi di Kota Kecil dan Pedesaan			√	Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)			√		Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.2.19	Pemantauan dan Evaluasi				√	Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	600.3	TATA RUANG (TATA KOTA)							
	600.3.1	Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.3.2	Perencanaan							
	600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)			√		Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Disperkimtan
	600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten			√		Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Disperkimtan
	600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota			√		Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Disperkimtan
	600.3.2.7	Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota			√		Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Disperkimtan
	600.3.3	Pemanfaatan dan Pengendalian							
	600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang			√		Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang							
		a. Keterangan Tata Ruang			√		Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		b. Berkas KKKPR/PKKPR			√		Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang			√		Eselon III	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	600.3.4	Pemetaan							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	600.3.4.1	Peta Dasar				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.3.4.3	Survey Pemetaan Ruang Air				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.3.4.4	Survey Pemetaan Ruang Udara				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	600.4	LINGKUNGAN HIDUP							
	600.4.1	Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			√		Eselon II	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Lingkungan Hidup
	600.4.2	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup							
	600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan			√		Eselon II	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Lingkungan Hidup
	600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam			√		Eselon II	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Lingkungan Hidup
	600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor							
	600.4.3.1	Evaluasi Penerapan			√		Eselon II	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Lingkungan Hidup
	600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup			√		Eselon II	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Lingkungan Hidup
	600.4.4	Ekonomi Lingkungan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
	600.4.5	Dampak Lingkungan							
	600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
	600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
	600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
	600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan							
	600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa			√		Eselon II	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Lingkungan Hidup

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		600.4.6.2			√		Eselon II	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.6.3			√		Eselon II	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.6.4				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan						
		600.4.7.1			√		Eselon II	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.7.2			√		Eselon II	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.7.3			√		Eselon II	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.7.4				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan						
		600.4.8.1				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.8.2				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.8.3				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.8.4				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.8.5				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat						
		600.4.9.1				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.9.2				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.10	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer						

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		600.4.10.1				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.10.2				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.10.3				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.10.4				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.11							
		600.4.11.1				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.11.2				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.12							
		600.4.12.1				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.12.2				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.12.3				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.13							
		600.4.13.1				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.13.2				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.13.3				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		600.4.13.4				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.14							
		600.4.14.1				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.14.2				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.15							
		600.4.15.1				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.15.2				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.15.3				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.15.4				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.16							
		600.4.16.1				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.16.2				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.17							
		600.4.17.1				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.17.2				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.18							
		600.4.18.1			√		Eselon II	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.18.2			√		Eselon II	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Lingkungan Hidup

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS			√		Eselon II	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Lingkungan Hidup
	600.4.19	Komunikasi Lingkungan							
	600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
	600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
	600.4.20	Penguatan Inisiatif Masyarakat							
	600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
	600.4.20.2	Kearifan Lingkungan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
	600.4.21	Peningkatan Peran Masyarakat							
	600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
	600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
	600.4.22	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan							
	600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
	600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
	600.4.23	Data dan Informasi Lingkungan							
	600.4.23.1	Pengelolaan Data			√		Eselon II	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Lingkungan Hidup
	600.4.23.2	Pengelolaan Informasi			√		Eselon II	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Lingkungan Hidup

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		600.4.23.3 Pengembangan Perangkat Lunak				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.23.4 Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.24 Kelembagaan Lingkungan							
		600.4.24.1 Kelembagaan dan Tata Laksana				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.24.2 Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.25 Standarisasi dan teknologi							
		600.4.25.1 Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.25.2 Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.25.3 Teknologi Ramah Lingkungan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.26 Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan							
		600.4.26.1 Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan				√	Eselon II	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.26.2 Laboratorium Rujukan dan Pengujian				√	Eselon II	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Dinas Lingkungan Hidup
	700	PENGAWASAN							
		700.1 PENGAWASAN INTERNAL							
		700.1.1 Rencana Pengawasan							
		700.1.1.1 Rencana Strategis Pengawasan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Inspektorat
		700.1.1.2 Rencana Kerja Pengawas Tahunan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Inspektorat
		700.1.1.3 Rencana Kinerja Tahunan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Inspektorat

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		700.1.1.4 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Inspektorat
		700.1.1.5 Rakor Pengawasan Tingkat Daerah				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Inspektorat
	700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan							
	700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL) Sub. Pengawasan Kinerja			√		Eselon II	Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Inspektorat
		a. Laporan Hasil Audit Kinerja		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		b. Laporan Hasil Pengawasan PPUG		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		c. Laporan Hasil Reviu Manajemen ASN		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		d. Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Lainnya		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		Sub. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah							
		a. Laporan Hasil Audit Kepatuhan		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		b. Laporan Hasil Audit PBJ		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		c. Laporan Hasil Pemeriksaan BOS		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		d. Laporan Hasil Pemeriksaan DAK		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		e. Laporan Hasil Pengawasan BMD/Tata Kelola BMD		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		f. Laporan Hasil Pengawasan Probitas Audit		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		g. Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		Sub. Reviu Laporan Kinerja							
		a. Laporan Hasil Evaluasi LKJIP		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		b. Laporan Hasil Evaluasi Sakip		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		c. KUA PPAS		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		d. Laporan Hasil Reviu HPS Proyek Strategis		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		e. Laporan Hasil Reviu LPPD		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		f. Laporan Hasil Reviu Perizinan		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		g. Laporan Hasil Reviu RENJA		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		f. Laporan Hasil Reviu RKA		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		d. Laporan Hasil Reviu RKPD		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		e. Laporan Hasil Reviu Standar Harga (HSPK, ASB)		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		f. Laporan Hasil Reviu UK PBJ		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		g. Laporan Hasil Reviu Standar Harga (HSPK, SBU)		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		Sub. Laporan Keuangan							
		a. Laporan Hasil Reviu Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		b. Laporan Hasil Reviu Keuangan Lainnya		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		Sub. Pengawasan Desa							
		a. Laporan Hasil Audit Dana Desa		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
	700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut			√		Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		700.1.2.3			√		Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		700.1.2.4				√	Semua	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		a. Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat/PDPT		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		700.1.2.5				√	Semua	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		a. Laporan Hasil Tindak Lanjut APIP		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		b. Laporan Hasil Tindak Lanjut BPK		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		700.1.2.6				√	Semua	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		700.1.2.7				√	Semua	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		a. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan CPNS dan PPPK		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		b. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Audit vaksin		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		700.1.2.8 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review				√	Semua	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		Sub. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah							
		a. Laporan Pendampingan SPIP		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		b. Laporan PK Apip		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		Sub. Pendampingan, Asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi							
		a. Reformasi dan Birokrasi		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		b. Reviu PMPRB		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		c. Zona Integritas		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		Sub. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi							
		a. Evaluasi Benturan Kepentingan		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		b. Pemenuhan Data MCP KPK		√			Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		700.1.2.9 Good Corporate Governance (GCG)				√	Semua	Tidak Memiliki Dampak Yang Dapat Mengganggu Kinerja	Inspektorat
800	KEPEGAWAIAN								
	800.1 SUMBER DAYA MANUSIA								
	800.1.1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		800.1.1.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.1.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.1.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.1.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai							
		800.1.2.1				√	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.2.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.2.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.2.4				√	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.2.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.2.6				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.2.7				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.2.8				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.1.3	Mutasi Pegawai							
		800.1.3.1				√	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		800.1.3.2			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.3.3			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.3.4			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.3.5			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.3.6			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.1.4	Pengembangan Karir							
		800.1.4.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.4.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.4.3			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.4.4			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.4.5			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara							
		800.1.5.1			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.5.2			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.5.3			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN							
		800.1.6.1			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.6.2			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		800.1.6.3		√			Eselon II	Menimbulkan Kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.6.4			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.6.5			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.6.6				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.7	Bantuan Hukum		√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai						
		800.1.8.1	Status Kepegawaian			√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian			√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.8.3	Keberatan Pegawai		√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian		√		Eselon II	Menimbulkan Kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian						
		800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian		√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian		√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik		√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.1.10	Pengawasan dan pengendalian							
	800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.1.11	Administrasi Pegawai							
	800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.1.11.2	Cuti Sakit			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.1.11.3	Cuti Bersalin			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	
			SR	R	T	B				
		800.1.11.4	Cuti Tahunan			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.11.5	Cuti Alasan Penting			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.11.6	Cuti Besar			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.1.12	Kesejahteraan Pegawai								
		800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	800.1.12.3	Tabungan Perumahan			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.1.12.4	Bantuan Sosial			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.1.12.5	Pakaian Dinas			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.1.12.10	Rekam Medis			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.1.13	Administrasi Perseorangan							
	800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)		√			Eselon II	Menimbulkan Kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)		√			Eselon II	Menimbulkan Kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan		√			Eselon II	Menimbulkan Kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.1.13.4	Sekretaris Daerah		√			Eselon II	Menimbulkan Kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional		√			Eselon II	Menimbulkan Kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.1.14	Penilaian Kompetensi							
	800.1.14.1	Penilaian Kompetensi			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	800.2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
	800.2.1	Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
	800.2.2	Pendidikan dan Pelatihan							
	800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
	800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
	800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
	800.2.2.4	Modul-modul diklat				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		800.2.2.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
		800.2.2.6				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
		800.2.2.7				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
		800.2.2.8				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
		800.2.2.9				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
	800.2.3	Widyaiswara							
		800.2.3.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
		800.2.3.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
		800.2.3.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
		800.2.3.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
		800.2.3.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
		800.2.3.6				√	Semua	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
	800.2.4	Penyelenggaraan Diklat							
		800.2.4.1				√	Semua		Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
		800.2.4.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
		800.2.4.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
		800.2.4.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	
			SR	R	T	B				
		800.2.4.5	Sistem informasi diklat			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
		800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
		800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
		800.2.5	Alumni				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
	900	KEUANGAN								
		900.1	KEUANGAN DAERAH							
		900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBD-P)			√		Eselon III	Memiliki Dampak yang Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
		900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran							
			a. Kebijakan Umum, Rensra, Strategi, dan Prioritas				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
			b. Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang Telah Dibahas Bersama Antara DPRD dan Pemerintah Daerah				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
			c. KUA Beserta Nota Kesepakatannya				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
			d. Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
			e. Nota Kesepakatan PPAS				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
			f. Prioritas Plafon Anggaran Sementara				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
		900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
		900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan							
			a. Pengantar Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
			b. Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		c. Dokumen Persetujuan Bersama Antara DPRD dan Kepala Daerah Tentang RaPerda APBD				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
		d. Dokumen Rancangan Penjabaran APBD Beserta Lampirannya				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
		e. Penyampaian Permohonan Evaluasi Kepada Gubernur Tentang RAPBD Beserta Penjabarannya				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
		f. Hasil Evaluasi Gubernur Tentang RAPBD				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
		g. Penetapan Perda APBD oleh Walikota Beserta Penjabarannya				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
		h. Peraturan Daerah (PERDA) Tentang APBD				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.2	Penyusunan Anggaran							
	900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.3	Pelaksanaan Anggaran							
	900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.3.2	Pendapatan				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	900.1.3.3	Belanja				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.3.4	Pembiayaan Daerah				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.3.7	Daftar Gaji				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.3.8	Kartu Gaji				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.3.10	Laporan Keuangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri							
	900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)				√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	900.1.4.4	Dokumen Loan Agreement (PHLN) Antara lain : Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu : Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA),				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.4.10	Staff Appraisal Report				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.4.11	Report /Laporan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.4.13	Completion Report/ Annual Report				√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri				√		Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)							
	900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		900.1.6.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
		900.1.6.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
		900.1.6.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
		900.1.7							
		900.1.7.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
		900.1.7.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
		900.1.7.3				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
		900.1.7.4				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
		900.1.7.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
		900.1.8							
		900.1.8.1				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
		900.1.8.2				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	900.1.9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.10	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu							
	900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.11	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah							
	900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional			√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.12	Anggaran Daerah							

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
		900.1.12.1			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
		900.1.12.2			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
		900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah						
		900.1.13.1			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
		900.1.13.2			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
		900.1.13.3			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
		900.1.13.4			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
		900.1.13.5				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
		900.1.14	Fasilitasi Dana Perimbangan						

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum Antara lain : Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.14.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Antara lain : Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Antara lain : Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Antara lain : Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.14.5	Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan Antara lain : Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.15	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah							
	900.1.15.1	Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Antara lain : Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain : Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain : Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah				√	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

Nomor	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan				Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			SR	R	T	B			
	900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli Antara lain : Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah				√	Semua	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain : Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah			√		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 12

BUPATI CIANJUR,

ttd/ *KAM*

H. HERMAN SUHERMAN